

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah tidak hanya sekedar tempat untuk mencari ijazah. Sekolah juga bukan sekedar tempat untuk mencari nilai. Tetapi sekolah ialah tempat untuk belajar. Belajar mengenai bermacam mata pelajaran, belajar tentang kehidupan sosial, dan belajar tentang kehidupan. Sekolah merupakan tempat untuk memperoleh ilmu serta pengetahuan yang baru (Dharma Putra, 2020).

Dalam pelaksanaannya pendidikan tidak terlepas dari pengelolaan pembiayaan. Biaya pendidikan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pendidikan tidak akan terlihat dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, atau masyarakat harus dipandang sebagai bentuk investasi karena nantinya di masa mendatang harus menghasilkan keuntungan atau manfaat secara langsung tentang kualitas sekolah, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Sistem kendali mutu dan jaminan kualitas mutu pendidikan menjadi isu yang paling utama dalam konteks pendidikan saat ini. Mutu pendidikan yang terlihat tentunya tertuju kepada mutu lulusan dari pendidikan itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan mutu lulusan yang bermutu harus didukung oleh proses pendidikan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan faktor yang bermutu, salah satu faktor pendukungnya yaitu pembiayaan (Dedy Achmad Kurniady, 2018:264).

Pembiayaan sebagai salah satu kebutuhan keuangan dalam pendidikan untuk dapat menunjang segala aktivitas pendidikan baik formal maupun informal. Pembiayaan menjadi salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam berjalannya proses pembelajaran. Agar pembiayaan yang ada dapat terealisasi dengan baik yang sesuai dengan kebutuhan maka pengelolaan yang ada didalamnya haruslah dikelola dengan secermat mungkin agar kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan terpenuhi dengan baik.

Manajemen pembiayaan merupakan suatu proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang sudah ada, mengalokasikan dana yang tersedia serta mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana dalam mendukung proses belajar mengajar sehingga terciptalah proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan terletak pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola dengan cara yang professional sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (Jaja Jahari, 2013:73-74).

Standar pembiayaan sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Standar Pembiayaan Pendidikan dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pada Bab IX Pasal 62 disebutkan bahwa Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka ketersediaan dana yang ada harus tercukupi. Apabila adanya ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dan dikhawatirkan dapat menghambat proses pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajibannya dalam hal pembiayaan pendidikan agar terlaksana dengan baik.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip Mulyasa (Aminatul Zahroh, 2017:28), pengertian mutu yaitu meliputi *input*, proses, dan *output*. *Input* pendidikan merupakan segala sesuatu yang ada karena dibutuhkan untuk keberlangsungan suatu proses. Proses pendidikan ialah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sementara *output* pendidikan merupakan kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari suatu proses dan perilaku sekolah.

Mutu lulusan suatu lembaga pendidikan dapat diukur dari pencapaian ujian nasional (UN). Departemen Pendidikan Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam pengendalian mutu pendidikan yang secara nasional dapat dilakukan melalui evaluasi sebagai satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya ujian nasional (UN) untuk mengukur dan menilai kompetensi dari ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik.

Mutu lulusan pendidikan di Indonesia mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi lulusan ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Dasar dan Menengah yang dikembangkan untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan kompetensi pada abad ke-21 ini, persaingan yang semakin global dan kebutuhan lokal serta nasional.

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan mampu untuk dicapai setelah menyelesaikan belajarnya di dunia pendidikan. Untuk mengetahui itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kesesuaian standar kompetensi lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap kebutuhan lulusan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Lalu, pencapaian standar kompetensi lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkala kepada lulusan dari setiap satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan juga kepada kesesuaian sumber daya dan proses pembelajaran yang digunakan disatuan pendidikan tertentu.

Dalam jurnal yang diteliti oleh Dedy Achmad Kurniady, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan atau disingkat SMK ada pada kategori yang

tinggi, maksudnya ialah kepala sekolah di SMK sudah mampu melaksanakan manajemen pembiayaan secara maksimal yang dimulai dari perencanaan pembiayaan dan penganggaran, implementasi, pengawasan dan pengendalian pembiayaan serta pertanggungjawaban. Manajemen pembiayaan di SMK menggambarkan hasil rata-ratanya sebesar 4,65 yang berada pada kategori tinggi. Sedangkan mutu sekolah di SMK ada pada rata-rata 4,63 yang berada pada kategori sangat tinggi, khususnya mutu peserta didik dengan 4,32. Hal ini menunjukkan manajemen pembiayaan pendidikan memiliki pengaruh terhadap mutu sekolah menengah kejuruan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak angka putus sekolah akan tetapi kepala sekolah telah berhasil dan mampu dalam mengelola pembiayaan pendidikan sehingga mutu sekolah didalamnya pun baik.

Pada kenyataannya pembiayaan pendidikan yang tinggi serta mahal pasti mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, sebaliknya bila pembiayaan minim pasti akan sulit untuk merealisasikan mutu lulusan yang bermutu. Hal itu dikarenakan pembiayaan pendidikan yang ada digunakan untuk kebutuhan proses pembelajaran, termasuk sarana prasarana yang ada di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung dengan Bapak Kholik selaku staf tata usaha di madrasah tersebut bahwa sumber anggaran yang didapat berasal dari dana Bantuan Operasional sekolah atau disingkat BOS dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau disingkat SPP. Dana BOS yang didapatkan cair selama 3 bulan sekali walaupun terkadang lebih dari itu karena kendala yang ada. Sedangkan SPP didapatkan dari sumbangan siswa setiap satu bulan. Semua dana tersebut utuh digunakan untuk menunjang kebutuhan proses pembelajaran siswa di sekolah seperti alat-alat pembelajaran, buku, dan lain sebagainya. Namun terkadang terjadi keterlambatan dalam sumber dana tersebut sehingga tidak jarang terjadi hambatan dalam proses pembelajaran sehingga haruslah mencari alternatif lain agar proses pembelajaran tetap berjalan seperti seharusnya (Kholik, wawancara, 21 Januari 2020).

Selain itu, dalam proses manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung diawasi langsung oleh pihak yayasan bukan dari kepala sekolah karena madrasah tersebut berada dibawah Yayasan Al Jawami. Setiap tahunnya lulusan yang ada di madrasah tersebut terus meningkat dan diterima di perguruan tinggi negeri atau swasta serta terdapat *outcome* yang didapatkan madrasah dari alumni dimana banyak guru-guru yang dulunya bersekolah di madrasah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada penelitian tersebut dengan judul “PENGARUH MANAJEMEN PEMBIAYAAN TERHADAP MUTU LULUSAN MADRASAH (Penelitian Di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang tepat sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana mutu lulusan madrasah di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu lulusan madrasah di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan mutu lulusan madrasah di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung.

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu lulusan madrasah di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dalam teoritis dan praktis. Adapun manfaat praktis dan teoritis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan serta wawasan untuk menjadi bahan penelitian selanjutnya. Terutama mengenai pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu lulusan madrasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah, terutama bagian manajemen pembiayaan. hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan yang lebih berkualitas.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan agar kedepannya peneliti dapat memahami permasalahan-permasalahan lebih baik lagi.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi lebih mengenai madrasah yang bersangkutan.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses belajar mengajar agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Manajemen pembiayaan adalah suatu usaha pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi yang dilakukan didalam tingkat satuan pendidikan. Terdapat indikator-indikator yang menjadi acuan dalam manajemen pembiayaan, diantaranya:

1. Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan ini merupakan tahapan awal dalam manajemen yang berisi tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut disusun secara objektif dengan tetap memerhatikan kemampuan, keahlian serta tingkat penerimaan anggota organisasi. Selanjutnya semua program kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan harus diarahkan sesuai dengan tujuan. Perencanaan memiliki jangka waktu tertentu di dalam usaha mencapai suatu tujuan. Perencanaan ada yang bersifat pendek (short term) dan jangka panjang (long term). Baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang semua itu dihasilkan oleh manajemen puncak sebagai bentuk dari tanggung jawabnya kepada organisasi secara keseluruhan (Ahmadi H. Syukran Nafis, 2012:28).

Dalam hal ini, perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan membuat RKS/RKM dan RKT. RKS/RKM merupakan rencana kerja sekolah/madrasah yang dilakukan selama 4 tahun, sedangkan RKT merupakan rencana kerja tahunan yang dilakukan setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib dimiliki sebelum sebuah sekolah/madrasah akan didirikan. Nantinya isi dari RKS/RKM dan RKT tersebut merupakan rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan oleh sekolah/madrasah dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

2. Pelaksanaan Pembiayaan

Menurut Mulyasa dalam buku Sulistyorini dan Muhammad Fathurrohman (2014:221), pelaksanaan yaitu kegiatan yang berdasarkan rencana yang sudah dibuat dan memungkinkan terjadinya penyesuaian yang diperlukan. Seluruh biaya yang sudah diperoleh oleh pihak sekolah/madrasah dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat harus digunakan secara efektif dan efisien. Maksudnya, segala pengeluaran yang dilakukan nantinya harus sesuai dengan kebutuhan dalam

proses kegiatan pendidikan yang sesuai dengan perencanaan pembiayaan pendidikan yang sudah dibuat sejak awal. pengalokasian anggaran diantaranya yaitu melalui proses kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah/madrasah. Salah satu dari penentu tercapainya tujuan sekolah/madrasah yaitu melalui proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Namun pengalokasian anggaran tidak hanya terbatas pada kegiatan formal seperti kegiatan belajar mengajar, tetapi beberapa kegiatan informal juga perlu dibiayai dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu peserta didik.

3. Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan ialah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian mengenai pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah atau sedang dilakukan yang sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Kegiatan pada pengawasan ini pada dasarnya untuk membandingkan tentang kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi (Didin Kuniadin dan Imam Machali, 2012:367). Selain itu pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan dari organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan (Irham Fahmi, 2011:84). Pengawasan anggaran dapat dilakukan oleh siapa-siapa saja yang terlibat di dalam lembaga pendidikan, baik itu warga sekolah, aparat fungsional, anggota legislatif, ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

4. Pertanggungjawaban Pembiayaan

Pertanggungjawaban keuangan pendidikan ialah salah satu aktivitas membuat laporan keuangan dari segala kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan yang disusun setelah semua bukti dari pengeluaran diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan untuk atasan langsung bendaharawan atau instansi terkait. Pelaporan penggunaan anggaran pendidikan adalah bagian dari sistem pertanggungjawaban yang memuat hasil-hasil pelaksanaan rencana

dan program pendidikan, masalah-masalah serta hambatan yang dihadapi, dan alternatif lain yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Secara garis besar, laporan penggunaan anggaran pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu laporan pelaksanaan proyek pembangunan yang terdiri atas laporan bulanan dan laporan triwulan, serta laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri atas laporan tengah tahunan dan laporan tahunan. Selain dua jenis laporan diatas, terdapat pula laporan khusus keuangan rutin dana SPP/DPP yaitu laporan daya serap anggaran rutin per triwulan, laporan penerimaan dan penyetoran SPP setiap bulan, dan laporan bulanan data fisik pendidikan (Matin, 2014:208).

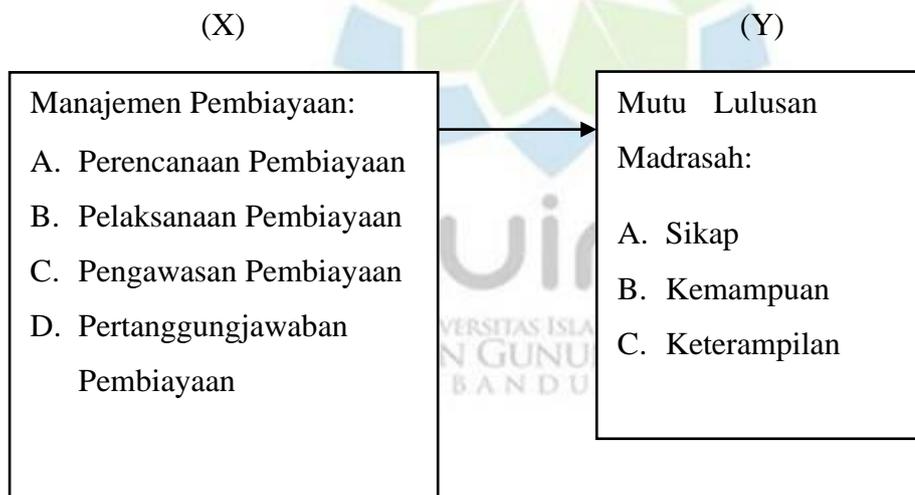
Dalam hal ini, indikator dari mutu lulusan sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa terdapat *input*, proses dan *output*. *Input* terdiri atas sekolah yang harus memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, harus tercantum sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (seperti uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan sebagainya), memiliki staf yang kompeten, dan yang terpenting adanya siswa sebagai fokus dari semua kegiatan di sekolah. Proses terdiri dari adanya proses kegiatan pembelajaran yang efektif, memiliki lingkungan sekolah yang aman dan tertib, adanya partisipasi dari warga sekolah dengan masyarakat, serta memiliki manajemen lingkungan hidup sekolah yang baik. Dan terakhir *output* ialah terdiri dari prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik misalnya nilai ujian akhir nasional, lomba karya ilmiah dan lain sebagainya. Sedangkan non akademik misalnya akhlak atau budi pekerti, dan perilaku sosial yang baik. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada *output* prestasi akademik dimana indikator ukuran prestasi akademik yaitu mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dan Pedoman Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) tingkat SMA/MA dimana dijelaskan bagaimana sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang harus dicapai.

Pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu lulusan madrasah memiliki kaitan yang sangat erat. Manajemen pembiayaan yang pengelolaannya tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan pastilah berdampak baik terhadap segala aspek yang ada, termasuk pada mutu lulusan madrasah. Dengan indikator yang sudah ada, manajemen pembiayaan akan dikelola dengan baik dan menghasilkan mutu yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Standar Kompetensi Lulusan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

Dengan demikian, dapat disusun kerangka berpikir keterkaitan antara pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu lulusan madrasah di Madrasah Aliyah Al Jawami Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Gambar 1.1

Skema Kerangka Berpikir



Keterangan:

X = variabel manajemen pembiayaan

Y = variabel mutu lulusan madrasah

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan manajemen pembiayaan terhadap mutu lulusan madrasah.

H_a = terdapat pengaruh yang signifikan manajemen pembiayaan terhadap mutu lulusan madrasah.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rezky Fahman Ramadhani (2017) dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap kualitas pendidikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Hal itu dikarenakan tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pembiayaan pendidikan lebih besar dari 0,05. Variabel pembiayaan pendidikan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,664.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Masditou (2017) dari POLTEKPAR Medan dengan judul penelitian “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu”. Hasil penelitiannya bahwa penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan oleh kepala pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung kepada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi segala sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah yang harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki setidaknya tiga tahap penting yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan

penilaian atau evaluasi. Ketiga tahapan tersebut apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), tahap pelaksanaan (accounting), dan tahap penilaian (auditing). Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu serta kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Rahmawati dan Kardoyo (2018) dari Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite, dan Integritas Sekolah Terhadap Mutu Lulusan Melalui Mutu Proses”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) mutu proses berpengaruh terhadap mutu lulusan sebesar 35,42%. (2) pembiayaan tidak berpengaruh terhadap mutu lulusan, pembiayaan pendidikan berpengaruh mutu proses sebesar 10,11%, mutu proses memediasi penuh pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan sebesar 19,1%. (3) kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap mutu lulusan sebesar 25,2%, kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap mutu proses sebesar 19,62%, mutu proses memediasi parsial pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan sebesar 51,9%. (4) peran komite sekolah tidak berpengaruh terhadap mutu lulusan, peran komite sekolah berpengaruh terhadap mutu proses sebesar 7,78%, mutu proses tidak memediasi pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu lulusan. (5) integritas sekolah tidak berpengaruh terhadap mutu lulusan, integritas sekolah terhadap mutu proses sebesar 4,93%, mutu proses memediasi secara penuh pengaruh integrasi sekolah terhadap mutu lulusan sebesar 13,7%.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Manoto Tagatorop (2017) dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul penelitian “Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah SMA Swasta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis koefisien korelasi antar variabel dengan menggunakan Rumus Product Moment bahwa korelasi antara biaya pendidikan dengan mutu sekolah sebesar 0,491. Uji signifikansi koefisien bahwa korelasi antar

variabel sebesar 4,40 t_{tabel} pada taraf signifikansi (0,05) dengan $dk = n - 2$ sebesar 2,00. Dari hasil perhitungan dapat diperoleh $t_{hitung} 4,40 > t_{tabel} 2,20$. Maka koefisien korelasi sangat signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif antara variabel pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Windi Aprilianti (2017) dari Universitas Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian “Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Kelas IX Di SMP Islam Raudlatul Hikmah Pamulang”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hasil uji t menunjukkan $T_{hitung} > T_{tabel}$, yaitu $3,779 > 2,119$ yang berarti H_0 ditolak. Kemudian dari hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 38,833 yang berarti mutu lulusan SMP Raudlatul Hikmah Pamulang ialah sebesar 39. Nilai koefisien regresi variabel harga (b) bernilai positif yaitu 0,521 yang berarti bila manajemen pembiayaan meningkat sebesar 0,521, maka mutu lulusan pun meningkat sebesar 0,521. Serta nilai *RSquare* sebesar 0,472 yang berarti sebesar 47,2% mutu lulusan SMP Raudlatul Hikmah Pamulang dipengaruhi oleh manajemen pembiayaan, dan sebesar 52,8% dipengaruhi oleh faktor lain.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Durotun Nafisah, Widiyanto dan Wijang Sakitri (2017) dari Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah”. Hasil penelitiannya bahwa manajemen pembiayaan di MA Rabbul Ulum dimulai dari perencanaan, pencatatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan. Proses perencanaan keuangan di MA Rabbul Ulum dimulai dengan mengadakan rapat pleno, mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran, Menyusun, mengusulkan, revisi, hingga pengesahan RAPBM. Dokumen-dokumen dalam pencatatan keuangan di MA Rabbul Ulum seperti buku kas, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank, laporan keuangan, dan buku tabungan telah mampu menjelaskan kondisi keuangan yang ada di MA Rabbul Ulum. Proses pengawasan di MA Rabbul Ulum dimulai dengan menentukan standar,

membandingkan pelaksanaan dengan standar, mengidentifikasi penyimpangan, hingga penemuan solusi atas penyimpangan. Dalam proses pertanggungjawaban keuangan di MA Ribhul Ulum dimulai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan hingga pengesahan laporan keuangan. Sehubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, diharapkan madrasah mampu mempertahankan dan melaksanakan manajemen pembiayaan secara efektif, efisien, serta transparan sehingga apa yang sudah direncanakan sesuai dengan tujuan madrasah dapat dicapai.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mazidah (2018) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) penyaluran pembiayaan dana BOS pada pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan alurnya, (2) pengawasan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dilaksanakan sesuai dengan waktu pencairan atau penyaluran serta pada saat pelaporan dana BOS tersebut, yaitu dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, (3) implikasi dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren yaitu: meningkatkan prestasi dan hasil belajar santri serta meningkatnya kesejahteraan guru.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Asfila, Murniati dan Nasir Usman (2015) dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah”. Hasil penelitiannya bahwa (1) perencanaan pembaiayaan pendidikan pada MTsN Janarata dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan seluruh personil sekolah. (2) teknik pengalokasian pembiayaan pendidikan berdasarkan kepada standar yang diprioritaskan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. (3) pengawasan pembiayaan dilakukan secara internal dan

eksternal, yaitu secara internal dilakukan oleh Kementerian Agama bidang keuangan dan secara eksternal oleh BPKP. (4) hambatan yang dialami oleh kepala sekolah dalam pembiayaan pendidikan ialah tidak sesuai antara perencanaan dengan penggunaan pembiayaan pendidikan yang dialokasikan pemerintah. Benturan pendapat antara kepala sekolah dengan komponen sekolah tentang penggunaan anggaran adrasah. Implikasi dari penelitian ini ialah terbentuknya gaya manajemen konstruktif yaitu upaya mendorong setiap personil sekolah paham dan memahami tentang pembiayaan, terciptanya budaya transparansi tentang pengelolaan pembiayaan serta terciptanya sikap rasa tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan pada MTsN Janarata.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi, Nasir Usman dan Cut Zahri (2012) dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada SMK Negeri Di Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, dengan melibatkan wakil kepala sekolah, ketua jurusan, bendaharawan, guru senior dan komite sekolah. penggunaan pembiayaan pendidikan ditinjau dari sisi keuangan, bahwa semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan pada sekolah harus diketahui bersama baik oleh kepala sekolah maupun pihak-pihak internal sekolah yang terlibat dalam proses penyusunan RAPBS. Pengawasan pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara mengamati setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Pemantauan atau pemeriksaan dengan melakukan pengamatan secara tidak langsung misalnya setiap pengeluaran dana harus atas persetujuan kepala sekolah atau bendahawan. Pemeriksaan keuangan juga dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan pada setiap kegiatan yang dilakukan, yang diserahkan oleh wakil kepala sekolah atau bendaharawan.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chairuwidha (2019) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Pengaruh Manajemen

Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Lulusan Kelas IX di SMP IT Ar Ridwan Bekasi. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil uji t menunjukkan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$, yaitu $4,424 > 2,120$, yang artinya yaitu H_0 ditolak. Kemudian dari hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 35,060, yang artinya mutu lulusan SMP IT Ar Ridwan Bekasi adalah sebesar 35. Nilai koefisien regresi variabel harga (b) yaitu 0,553, angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat Manajemen Pembiayaan Pendidikan maka Mutu Lulusan akan meningkat sebesar 0,553. Serta nilai *RSquare* sebesar 0,550 yang artinya sebesar 55% mutu lulusan SMP IT Ar Ridwan Bekasi dipengaruhi oleh manajemen pembiayaannya dan sebesar 45% dipengaruhi oleh faktor lain.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Asdiana (2018) dari STAIN Gajah Putih Takengon dengan judul “Implikasi Pembiayaan Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan MTsS Di Ponpes Modern Maqam Mahmuda Kabupaten Aceh Tengah”. Hasil penelitiannya yaitu strategi-strategi mutu pendidikan MTsS Ponpes Modern Maqam Mahmuda adalah dengan membentuk *timwork* peningkatan mutu yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi mutu pendidikan di MTsS Ponpes Modern Maqam Mahmuda. Penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan SNP dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. MTsS Pnpes Modern Maqam Mahmuda telah memenuhi SNP. Pencapaian ini didukung berbagai faktor diantaranya yaitu peserta didik, kurikulum, dan sarana prasarana, sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem penilaian pendidikan yang harus fokus pada hasil pembelajaran dan kurang memperhatikan penilaian proses pembelajaran. Implementasi peningkatan mutu pendidikan dan upaya mengatasi hambatan berdasarkan SNP meliputi kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban mengajar dan kalender pendidikan telah dijabarkan dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan SNP. Pengelolaan sistem Manajemen yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang baik dan menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti M. Elik (2018) dari Universitas Nusa Cendana Kupang dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Pengelolaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kupang”. Hasil analisis data variabel pembiayaan pendidikan (X1) terhadap mutu pendidikan (Y) di SMK N 4 Kupang berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat terlihat pada hasil uji-t diperoleh thitung sebesar 2,597 dengan tingkat probabilitas (sig) adalah 0,012 jika dibandingkan pada ttabel pada $\alpha=0,05$, berarti thitung > ttabel dan sig < 0,05 (2,597>2,005 dan 0,12<0,05). Berdasarkan hasil olahan data pada jawaban responden, ditemukan bahwa variabel proses pendidikan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pendidikan (Y). Hasil uji thitung diperoleh sebesar 5,701 dengan probabilitas (sig) 0,000 dibandingkan dengan ttabel pada $\alpha=0,05$ diperoleh ttabel 2,005. Hal ini berarti thitung > ttabel dan sig < 0,05 (5,701>2,005 dan 0,000<0,05). Hasil uji-t tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengelolaan pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMK N 4 Kupang. Berdasarkan hasil olahan data variabel pembiayaan pendidikan (X1) dan variabel proses pendidikan (X2) terhadap mutu pendidikan (Y) di SMK N 4 Kupang. Berdasarkan hasil perhitungan uji F diperoleh bahwa Fhitung sebesar 13,687 dengan probabilitas (sig) sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Jika dikonsultasikan dengan Ftabel pada $\alpha=0,05$ $df_1 = 2$ dan $df_2 = 25$ diperoleh Ftabel sebesar 3,05. Hal ini berarti Fhitung > Ftabel dan sig < 0,05 (13,687>3,05) dan sig (0,000<<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independent yaitu pembiayaan dan proses pendidikan berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap mutu pendidikan di SMK N 4 Kupang.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady (2016) dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah

secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan terutama pada saat perencanaan dan pengawasan pembiayaan. Sedangkan pada prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febriyanti Alfiningsih (2018) dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan di SMK Satria Jakarta Barat”. Hasil penelitiannya yaitu terdapat pengaruh antara pembiayaan pendidikan terhadap kualitas pendidikan di SMK SATRIA Jakarta Barat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai bahwa $t_{hitung} (6,719) > t_{tabel} (2,003)$ sedangkan hasil pengujian menggunakan regresi linear sederhana diperoleh bahwa $Y = 39,064 + 0,726X$, karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+), sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan. Diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,446 yang artinya 44.6% kualitas pendidikan di SMK SATRIA Jakarta Barat dipengaruhi oleh pembiayaan pendidikan, dan sebesar 55,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana dan prasarana serta kualitas tenaga pendidik.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Lathifatul Mariyyah (2018) dari IAIN Surakarta dengan judul “Manajemen Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Bahrul Muttaqin Dukuh Pilangdoyong Desa Kemusu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perencanaan pembiayaan di Madin Bahrul Muttaqin selalu dibuat 6 bulan sekali bersama Kepala, bendahara, wali murid dan Ustadz-Ustadzah Madrasah Diniyah Bahrul Muttaqin. Perencanaan ini dibuat untuk melengkapi kekurangan dari fasilitas yang belum ada di Madrasah Diniyah Bahrul Muttaqin. (2) pelaksanaan pembiayaan di Madin Bahrul Muttaqin Kepala Madin merupakan pengelola penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana yang keluar harus

disetujui oleh Kepala Madin. Setiap pengeluaran rutin ataupun non rutin Kepala Madin harus mengetahui. (3) pertanggungjawaban dan pelaporan di Madin Bahrul Muttaqin dalam bentuk laporan yang dilaporkan 6 bulan sekali. Sebelum dilaporkan harus disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Madin dan Bendahara Madin. Pelaporan disampaikan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faizal Fahmi (2014) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan Karang Bahagia – Bekasi”. Hasil penelitian yang diperoleh di Madrasah Aliyah Pembaharuan menunjukkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari 1 Tata Usaha dan 2 orang guru melalui pertanyaan yang diajukan.
17. Penelitian yang dilakukan oleh Yudithia (2014) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Sekolah Terhadap Kompetensi Siswa Kelas XII Pada Kelompok Mata Pelajaran Produktif Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) di SMK 1 Sedayu”. Hasil penelitiannya yaitu terhadap pengaruh pembiayaan pendidikan sekolah terhadap kompetensi siswa kelas XII pada kelompok mata pelajaran produktif program keahlian teknik instalasi tenaga listrik (TITL) di SMK Sedayu. Hal tersebut terlihat dari $F_{hitung} = 8,545$ lebih besar dari $F_{tabel} = 3,96$ ($F_{hitung} > F_{tabel}$), diperoleh persamaan $Y = 0,777 + 0,008X$ dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,095 artinya variabel pembiayaan pendidikan sekolah mempengaruhi variabel kompetensi siswa sebesar 9,5%.
18. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Ahmad Noval (2019) dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta: Studi Kasus di MTS Wihdatul Fikri Kab. Bandung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) MTs Wihdatul Fikri mengandalkan biaya BOS dari pemerintah (dana pemerintah

2014-2016 sebesar Rp. 207.850.000); (2) dari 2014 hingga 2016 sumber dana lain yang diterima MTs Wihdatul Fikri hanya datang dari IP dan individu yang lebih rendah daripada dari pemerintah (hanya Rp. 69.200.00); (3) akuntabilitas MTs Wihdatul Fikri rendah karena tidak adanya transparansi dalam laporan pertanggungjawaban madrasah baik terkait dana BOS atau dana lain dari IP.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Sonedi, Zulfa Jamalie dan Majeri (2017) dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Darul Ulum Palangkaraya telah dibuat melalui perencanaan yang sebelumnya dilakukan rapat bersama yayasan, komite sekolah dan orang tua, meskipun rancangan anggaran tersebut dibuat dalam bentuk paling sederhana. Dalam hal penggunaan dana orang tua peserta didik sudah sesuai dengan kebutuhan dan RAPBM yang dibuat, dalam artian akuntansi sudah dibuktikan pembukuan. Selanjutnya pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan langsung oleh kepala sekolah.
20. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Gamar (2019) dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dengan judul “Implementasi Manajemen Pembiayaan (Studi Kasus MTs Darul Khair Masing, Kec. Batui, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) sumber-sumber pembiayaan pendidikan bersumber dari masyarakat umum, orang tua santri serta donator tetap, (2) prosedur manajemen anggaran pendapatan pembiayaan pendidikan sudah dibuat dalam bentuk program pencapaian anggaran pendapatan. (3) penggunaan anggaran belanja pembiayaan pendidikan disesuaikan dengan manajemen awal yang sudah dibuat serta disepakati bersama dengan berdasarkan panduan atau patokan yang telah ada, (4) pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan MTs Darul Khair Masing Luwuk Banggai sudah sesuai dengan manajemen dan dilaksanakan pada akhir tahun. Pelaku penanggungjawab pengguna anggaran pembiayaan tersebut adalah bendahara selaku koordinator

keuangan, dan (5) pengawasan pembiayaan pendidikan MTs Darul Khair Masing Luwuk Banggai ditugaskan kepada tim khusus yang bertugas mengawasi serta mengontrol keuangan. Tim yang terlibat di dalam pengawasan anggaran ialah masyarakat selaku orang tua.

